

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM INDONESIA PINTAR (PIP) DI SMA NEGERI 2 BARRU

Sulfitriani<sup>1\*</sup>, Abdi<sup>2</sup>, Nurbiah Tahir<sup>3</sup>

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### Abstract

*This study aimed to find out the implementation of policies applied to the Smart Indonesia Program; Program Indonesia Pintar (PIP) at SMA Negeri 2 Barru. This study used a qualitative research using 4 informants. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The results of this study indicated that the Implementation of the Smart Indonesia Program (PIP) in SMA Negeri 2 Barru was quite good. Through several indicators of implementation in this study, namely: 1) policy standards and targets, very helpful for underprivileged students in education, 2) human resources, both facilities and infrastructure were quite good, 3) communication between organizations and strengthening activities, communication between implementers had been good in encouraging the success of PIP policies, 4) Characteristics of implementing agents, existing SOPs were in line with policies, 5). The condition of the PIP policy environment had the support of the school and parents, 6) the disposition of the implementor had implemented the policy implementation well because he understood the existing SOPs.*

**Keywords:** *implementation, policy, smart indonesia program*

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi kebijakan yang diterapkan pada Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Barru. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif menggunakan dengan informan sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan wawancara, observasi secara langsung, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 barru, sudah cukup baik. Melalui beberapa indikator implementasi dalam penelitian ini yaitu: 1) standar dan sasaran kebijakan, sangat membantu siswa kurang mampu dalam pendidikan, 2) sumber daya, sumber daya manusia baik sarana dan prasana sudah cukup baik, 3) komunikasi antar organisasi dan penguat aktivitas, komunikasi antar pelaksana sudah baik dalam mendorong berhasilnya kebijakan PIP, 4) Karakteristik agen pelaksana, SOP yang ada sudah cocok dengan kebijakan, 5). kondisi lingkungan kebijakan PIP ini mendapat dukungan dari pihak sekolah dan orang tua, 6) disposisi implementor melaksanakan implementasi kebijakan dengan baik karena memahami SOP yang ada.

**Kata kunci:** *implementasi, kebijakan, program indonesia pintar*

---

\* sulfitriani@gmail.com

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan faktor utama yang berpengaruh penting untuk perkembangan generasi mudah penerus bangsa, serta pendidikan merupakan usaha untuk menyiapkan siswa yang dapat berperan dalam masyarakat yang akan datang, baik sebagai individu maupun sebagai warga masyarakat.

Pendidikan juga merupakan kebutuhan setiap warga negara yang selalu mendambakan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai unsur pokok dalam pembangunan negara. Pendidikan termasuk prioritas utama dalam menghadapi kehidupan, dengan adanya pendidikan yang cukup kita dapat hidup layak seperti yang diharapkan.

Adapun masalah pendidikan yang cukup memperhatikan adalah tingginya jumlah siswa putus sekolah yang disebabkan oleh faktor ekonomi.

Implementasi Kebijakan pada dasarnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Implementasi merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan.

Jones (1996) dalam Mustari (2015) “tidak berlebihan jika dikatakan implementasi adalah aspek penting dari

keseluruhan proses lahirnya kebijakan.” Namun kebanyakan dari kita seringkali beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pihak pembuat kebijakan tersebut.

Program Indonesia Pintar adalah salah satu dari program perlindungan sosial yang dibuat oleh pemerintah melalui ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam Pasal 2 ayat (2) menjelaskan mengenai program perlindungan sosial untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan yang meliputi: Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat.

Dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2014 diantaranya mengamanatkan tentang Program Indonesia Pintar (PIP) kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan menyalurkan dana Program Indonesia Pintar (PIP) kepada siswa yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya.

Program Indonesia Pintar (PIP) adalah suatu program pemberian bantuan pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, dan korban bencana alam/musibah.

Program Indonesia Pintar (PIP) dilaksanakan dengan dikeluarkannya Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang mana kartu tersebut diberikan sebagai penanda/identitas penerima bantuan pendidikan Program Indonesia Pintar (PIP). Program Indonesia Pintar (PIP) ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu Program Indonesia Pintar (PIP) sebagai alternatif untuk meminimalisir tingkat *drop out* atau putus sekolah akibat kemiskinan. Akan tetapi, pada kenyataannya program ini tidak terealisasi dengan semestinya.

## METODE

Waktu dalam penelitian ditempuh selama 3 bulan dimulai pada bulan Desember 2021 hingga Maret 2022. Lokasi penelitian berada di SMA

Negeri 2 Barru di Kecamatan Soppeng Riaja Kabupaten Barru, Karena sekolah ini merupakan salah satu sekolah yang menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP).

Dalam penelitian mengenai “Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Barru” peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan memahami permasalahan yang sedang terjadi atau dialami objek penelitian, dengan menggunakan macam metode ilmiah seperti interview, observasi, serta pengamatan dokumen.

Tipe penelitian adalah studi kasus, ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang aktual yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah lewat.

Penelitian (*case study*) atau penelitian lapangan (*field study*) dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang masalah keadaan dan posisi suatu peristiwa yang

sedang berlangsung saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat apa adanya.

Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi atau masyarakat.

Penelitian merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu dan hasil penelitian tersebut memberikan gambaran luas serta mendalam mengenai unit sosial tertentu.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Isi pembahasan ini mendiskusikan hasil penelitian tentang Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Barru. Kebijakan Program Indonesia Pintar merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengurangi angka putus sekolah bagi siswa kurang mampu dalam bentuk pemberian dana bantuan.

Program Indonesia Pintar sebagai upaya pemerintah untuk mendukung dari pelaksanaan Pendidikan Nasional, dimana hal tersebut termuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Program Indonesia Pintar.

Terkait dengan penelitian ini penulis mengaitkannya terhadap

Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Barru dilakukan dengan berdasarkan teori Van Metter dan Van Horn, menyatakan bahwa ada enam variabel (kelompok variabel) yang harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi dilakukan dengan indikator Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (kondisi sosial, ekonomi, dan politik), disposisi implementor. Berikut merupakan unsur-unsur yang menjadi inti dari penelitian ini, yaitu:

### **Standar dan Sasaran Kebijakan**

Standar dan sasaran kebijakan yaitu perincian yang mengenai sasaran yang ingin dicapai melalui kebijakan beserta standar untuk mengukur pencapaiannya, dikarenakan implementasi kebijakan program Indonesia Pintar dalam mengukur keberhasilan kebijakan dari ukuran dan tujuannya di SMA Negeri 2 Barru, dengan Standar dan sasaran kebijakan yang baik dan benar dalam Implementasi PIP ini, maka dapat diperkirakan sasaran pada penerima bantuan ini sampai kepada pihak yang

menjadi sasaran program pemerintah ini.

Adapun upaya yang dilakukan petugas kebijakan di SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) sudah melakukan tindakan sesuai dengan aturan kebijakan dan melakukan pendataan yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah para keluarga tidak mampu atau kurang mampu dalam hal perekonomian terutama dalam memenuhi kebutuhan sekolah. Namun peneliti menemukan beberapa siswa yang tergolong keluarga yang kurang mampu tidak menerima bantuan namun ada pula siswa yang tergolong mampu namun menerima bantuan Program Indonesia Pintar (PIP), sehingga standard dan sasaran kebijakan belum tepat sasaran.

### **Sumber Daya**

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam implementasi kebijakan publik. Sumber daya meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya fasilitas. Sumber daya manusia berkenaan dengan kecakapan pelaksana kebijakan publik untuk mengimplementasikan kebijakan secara efektif.

Terkait dengan sumber daya tentu di Program Indonesia Pintar pemerintah menyediakan sumber daya manusia,

dana, dan fasilitas untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Adapun upaya yang dilakukan petugas kebijakan di SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dalam mengelola sumber daya dengan sumber daya manusia yang bekerja sudah berkompeten untuk melakukan pekerjaannya.

Sumber daya finansial dengan adanya anggaran Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat, serta sumber daya fasilitas atau pendukung dalam hal sarana dan prasana oleh pihak sekolah di pergunakan sebaik mungkin dan berusaha terus ditingkatkan.

Berdasarkan hasil penelitian Implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Barru, peneliti melihat sudah dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan melaksanakan dan memanfaatkan sumber daya yang telah di sediakan pemerintah pusat. Sesuai dengan peraturan yang tertulis pada Permendikbud Nomor 19 Tahun 2016. Selain adanya sumberdaya dana ada pula sumber daya manusia dan sumber daya fasilitas untuk menunjang berjalannya proses implementasi Program Indonesia Pintar ini bisa sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

## **Komunikasi Antar Organisasi dan Penguatan Aktivitas**

Komunikasi antar organisasi merupakan salah satu elemen penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik. Keberhasilan sebuah kebijakan dapat dilihat dari komunikasi yang ada. Kebijakan harus disampaikan kepada pihak-pihak yang terkait, sehingga informasi yang disampaikan harus akurat.

Berdasarkan dari hasil penelitian adapun upaya yang dilakukan petugas kebijakan di SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dengan melakukan komunikasi dengan melakukan sosialisasi ke siswa untuk disampaikan ke orang tua masing-masing, dan diberikan kebebasan kepada orang tua siswa yang belum paham untuk datang kesekolah dengan persyaratan yang telah ditentukan dalam Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dan petugas kebijakan PIP di SMA Negeri 2 Barru sudah cukup baik.

## **Karakteristik Agen Pelaksana**

Karakteristik lembaga/organisasi pelaksana (termasuk kompetensi dan ukuran kerja agen pelaksana, tingkat

kontrol hierarkis pada unit pelaksana terbawah pada saat implementasi, dukungan politik dari eksekutif dan legislatif serta keberkaitan formal dan informal dengan lembaga pembuat kebijakan).

Berdasarkan dari Indikator penelitian ini, Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Barru, peneliti melihat bahwa dalam karakteristik agen pelaksanaan dalam Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Barru terbilang sangat kurang sehingga pelaksana kebijakan kewalahan dalam mengurus dan menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini bisa dikatakan bahwa karakteristik agen pelaksana belum sesuai atau belum terpenuhi, namun hal tersebut tetap dijalankan sebagaimana mestinya, dan tetap berusaha diperbaiki dan meningkatkannya.

## **Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Politik**

Kondisi sosial ekonomi dan politik, yaitu lingkungan eksternal yang dapat berpengaruh besar bagi para pelaksana dalam melaksanakan Kebijakan. Adapun upaya yang dilakukan petugas kebijakan di SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) dimana masih ada beberapa siswa yang tergolong tidak mampu namun tidak menerima

bantuan begitupun sebaliknya. sehingga dikatakan belum tepat sasaran petugas sekolah akan terus berusaha agar PIP ini tepat sasaran.

Peneliti juga menemukan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik belum baik dimana masih terdapat siswa yang tidak mampu namun tidak menerima bantuan serta adapula yang tergolong mampu namun menerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) selain itu di dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini sehingga beberapa hal menjadi terhambat, namun pelaksana kebijakan tetap berusaha memaksimalkan Program ini di era pandemik saat ini.

### **Disposisi Implementor**

Disposisi merupakan karakteristik atau watak yang dimiliki oleh implementor. Disposisi menentukan keberhasilan sebuah implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Berdasarkan dari hasil penelitian ditemukan bahwa dalam hal disposisi sudah sesuai prosedur, namun belum berjalan secara optimal. Terlihat komitmen dari petugas SMA negeri 2 Barru dalam menjalankan Program

Indonesia Pintar (PIP) tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri, dengan kondisi pandemik sehingga implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) ini belum tercapai secara maksimal dikarenakan kondisi pandemik saat ini.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan hasil pembahasan mengenai implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) di SMA Negeri 2 Barru dapat dinilai dengan enam indikator, diantaranya: Standar dan sasaran kebijakan, Sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana, lingkungan (kondisi sosial,ekonomi, dan politik), dan disposisi implementor, maka dapat disimpulkan bahwa: 1) Standar dan sasaran kebijakan, berdasarkan hasil penelitian terkait standar dan sasaran kebijakan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan petugas SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) belum tepat sasaran.standard dan sasaran kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) yaitu keluarga yang kurang mampu atau tidak mampu, namun ada pula siswa yang tergolong mampu namun menerima bantuan Program Indonesia Pintar

(PIP), 2) Sumber daya, berdasarkan hasil penelitian terkait sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan petugas SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) sudah cukup memadai. Dilihat dari ketersediaan jumlah pegawai di sekolah SMA Negeri 2 Barru yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat sesuai dengan kompetensi dan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melakukan proses pelayanan sudah cukup baik dan memadai, 3) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas, berdasarkan hasil penelitian terkait sumber daya yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan petugas SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) sudah baik. dalam komunikasi dilakukan dua cara yaitu, dalam bentuk sosialisasi langsung dan tidak langsung. Salah satu hasil dari komunikasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dengan adanya sosialisasi langsung ke sekolah-sekolah tentang program Indonesia Pintar (PIP), 4) Karakteristik agen pelaksana, berdasarkan hasil penelitian terkait karakteristik agen pelaksana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan petugas SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) terbilang sangat kurang. Dimana dalam

pelaksana kebijakan kewalahan dalam mengurus dan menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP). Hal ini bisa dikatakan bahwa karakteristik agen pelaksana belum sesuai atau belum terpenuhi sebagaimana mestinya, 5) Kondisi sosial, ekonomi, dan politik, berdasarkan hasil penelitian terkait kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan petugas SMA Negeri 2 Barru mengenai Program Indonesia Pintar (PIP) belum baik. dimana masih terdapat siswa yang tidak mampu namun tidak menerima bantuan serta adapula yang tergolong mampu namun menerima Bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) selain itu di dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini sehingga beberapa hal menjadi terhambat, namun pelaksana kebijakan tetap berusaha memaksimalkan Program ini di era pandemik saat ini, 6) Disposisi implementor, berdasarkan hasil penelitian terkait disposisi implementor belum berjalan secara optimal. Terlihat komitmen dari petugas SMA negeri 2 Barru dalam menjalankan Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri, dengan kondisi pandemik sehingga implementasi kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) ini

belum tercapai secara maksimal dikarenakan kondisi pandemik saat ini.

## REFERENSI

- Prasetyo, A. B. (2018). *Implementasi Program Kartu Indonesia Pintar di SD Negeri Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu* (Skripsi, Universitas Sriwijaya, Palembang).
- Kusumanegara, S. (2010). *Model dan Aktor dalam Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media.
- Mustari, N. (2015). *Pemahaman Kebijakan Publik: formulasi, implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutika Prio.
- Rohaeni, N. E., & Saryono, O. (2018). Implementasi Kebijakan Program Indonesia Pintar (PIP) Melalui Kartu Indonesia Pintar (KIP) dalam Upaya Pemerataan Pendidikan di SMP Negeri 1 Manonjaya dan SMP Negeri 2 Cineam Kabupaten Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Education Management & Administration Review*, 2(1).
- Siahaan, N. A. (2018). *Implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) di Kelurahan Sinaksak Kecamatan Tapian Dolok Kabupaten Simalungun*. Makalah. Universitas Sumatera Utara.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, dalam Pasal 2 ayat (2).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 10 tahun 2020 Pasal 4 ayat 1
- Peraturan Bersama antara Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah dan Direktur Jendral Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat. Nomor 08/D/PP/2016, Nomor 04/C/PM/2016. *Petunjuk Pelaksanaan Program Indonesia Pintar Tahun 2016*.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016. *Program Indonesia Pintar*.
- Setyawati, S (2018). *Efektifitas Program Kartu Indonesia Pintar Bagi Siswa SMK di Kecamatan Jeruklegi Kabupaten Cilacap (Studi Permendikbud No 12 Tahun 2015 tentang Program Indonesia Pintar* (Skripsi, IAIN Purwokerto, Purwokerto).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat 1, 2, 3.
- Yanti, W. (2018). *Implementasi Pendistribusian Kartu Indonesia Pintar (KIP) Di Kelurahan Labuhan Deli Kecamatan Medan Marelan*. (Skripsi, Universitas Medan Area, Medan).